

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan sebagai salah satu bagian penting dalam proses pembangunan nasional merupakan salah satu faktor penentu pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Oleh karenanya pendidikan dipandang sebagai suatu investasi dalam pengembangan sumber daya manusia. Fungsi pendidikan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa:

Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab

Tujuan yang diinginkan dari pendidikan nasional tersebut jelas berkenaan dengan pembentukan manusia yang lebih baik dengan berbagai karakteristiknya. Agar tujuan pendidikan nasional dapat dicapai maka pendidikan harus dapat dikenyam oleh setiap orang. Hal ini dinyatakan dalam Bab IV pasal 5 ayat 1 yang berbunyi bahwa "Setiap warga negara mempunyai hak sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu". Pasal 11 ayat 1 lebih menegaskan kepada hal siapa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan yang idealnya dapat dinikmati oleh seluruh warga negara. Pasal tersebut berbunyi :

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Pasal tersebut jelas menegaskan bahwa sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan kesempatan dan kemudahan mendapatkan pendidikan bagi setiap warga negara. Pasal tersebut juga mengandung arti bahwa pendidikan itu bertujuan memberikan peluang yang sama kepada seluruh warga negaranya untuk bersama - sama belajar, menuntut ilmu dan memperoleh pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhan dan tingkat usianya.

Untuk memperoleh pendidikan yang baik banyak hal yang harus dipersiapkan agar jalannya proses belajar mengajar berjalan secara efektif dan efisien . Salah satu sarana untuk melaksanakan pendidikan yang bermutu adalah hal yang berkenaan dengan pembiayaan. Pendidikan yang bermutu dan perluasan kesempatan belajar akan dapat dicapai antara lain apabila tersedia dana yang mencukupi. Untuk menyediakan berbagai sumber dan fasilitas yang dibutuhkan, sehubungan dengan mutu yang diharapkan, tentu biayanya tidak murah. Oleh karena itu penyelenggaraan pendidikan yang bermutu membutuhkan dana yang besar dan menuntut pelaksanaan pengelolaan yang baik dan transparan.

Dalam upaya menyelenggarakan dan meningkatkan sistem pendidikan yang bermutu tersebut, biaya merupakan komponen yang sangat penting, malah dapat dikatakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya.

Dedi Supriadi (2003:3) mengemukakan bahwa : Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (instrumental input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan (di sekolah). Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan , baik tujuan yang bersifat kuantitatif maupun

kualitatif biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan (di sekolah) tidak akan berjalan.

Berkaitan dengan ini Zymelman (1975) dalam pengelolaan pendidikan mengemukakan bahwa :

"Pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut analisis sumber - sumber dana tetapi juga menyangkut penggunaan dana - dana itu secara efisien. Makin efisien suatu sistem pendidikan, semakin kecil dana yang diperlukan untuk pencapaian tujuan - tujuan pendidikan itu. Oleh karena itu dengan pengelolaan biaya secara baik akan membantu meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Artinya dengan anggaran yang tersedia dapat mencapai tujuan - tujuan pendidikan yang lebih produktif, efektif, efisien dan relevansi antara kebutuhan di bidang pendidikan dengan pembangunan dan masyarakat."

Setiap biaya pendidikan yang dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan di sekolah dituntut tanggung jawab rasional dan moral. Tanggung jawab rasional ialah tanggung jawab yang diberikan secara administratif. Dan secara moral adalah sejauh mana dana yang digunakan itu dimanfaatkan untuk kepentingan perkembangan peserta didik selama mengikuti pelajaran di sekolah. Dengan demikian program - program yang ditujukan untuk menciptakan iklim proses belajar mengajar yang kondusif sehingga menumbuhkan rasa percaya diri, perilaku inovatif dan produktif serta merangsang peserta didik aktif berpartisipasi dalam proses belajar mengajar perlu mendapatkan perhatian utama.

Dana yang dimiliki oleh sekolah bukanlah milik perseorangan kepala sekolah atau petugas yang ditunjuk dan dipercayakan mengelolanya. Setiap dana atau uang yang dimilikinya itu harus dikelola secara bertanggung jawab, darimanapun sumbernya. Kepala sekolah bertanggung jawab mengatur

pengelolaannya agar pembiayaan tersebut berdaya guna bagi pelaksanaan kegiatan yang terarah pada pencapaian mutu sekolah. Artinya kepala sekolah harus mampu mempergunakan uang yang dimiliki sekolah untuk membiayai kegiatan dan pengadaan sarana dan peralatan yang tepat secara cermat dan hemat. Sedangkan petugas yang ditunjuk untuk membantu kepala sekolah dalam mengelola keuangan sekolah harus bertanggung jawab terhadap kebenaran penggunaan, dan keamanan penyimpanan dan pendistribusiannya kepada kegiatan sesuai yang telah direncanakan.

Kegiatan pengelolaan keuangan yang dimiliki sekolah, baik yang dilakukan oleh kepala sekolah dengan atau tanpa bantuan petugas lain dikenal administrasi keuangan sekolah. Menurut Hadari Nawawi dkk (1986 : 97). Kegiatan administrasi keuangan sekolah adalah :

Penentuan kebijaksanaan keuangan dalam pengadaan dan penggunaannya agar terwujud kegiatan yang tepat bagi pencapaian tujuan. Aspek-aspeknya yang utama menyangkut perencanaan, pengadaan dan penggunaan uang termasuk di dalamnya kontrol terhadap ketepatan penggunaan dan administrasi pembukuannya.

Dalam kutipan tersebut terdapat suatu aspek yang penting yakni aspek pertanggungjawaban, mengingat uang merupakan alat yang dapat memuaskan kebutuhan manusia. Dengan demikian uang mudah merangsang terjadinya penyalahgunaan wewenang, yang berakibat uang yang seharusnya digunakan untuk mewujudkan kegiatan bersama dapat beralih pada sasaran lain berupa pemenuhan kebutuhan pribadi para petugas yang mengelolanya.

Pemanfaatan biaya yang tersedia, baik yang bersumber dari biaya pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun dari biaya masyarakat telah

dialokasikan dalam RAPBS yaitu Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, tata usaha sekolah, pemeliharaan sekolah, kesejahteraan pegawai, pembinaan pegawai dan sarana - prasarana sekolah.

Ketersediaan dana serta pengelolaannya yang baik perlu dilakukan pada jenjang pendidikan apapun. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai salah satu jenis pendidikan pada jenjang pendidikan menengah tidak terlepas dari keharusan untuk mengelola keuangan dengan baik dan benar. Diharapkan ketersediaan dana yang mencukupi serta pengelolaan yang efektif pada Sekolah Menengah Kejuruan mampu mendorong terciptanya mutu sekolah yang baik. Mutu sekolah yang baik sangat dituntut dari Sekolah Menengah Kejuruan, karena jenis pendidikan ini berperan untuk menyediakan tenaga kerja yang berkualitas.

Kota Cirebon sebagai kota pelabuhan di Propinsi Jawa Barat pada saat ini memiliki 17 buah Sekolah Menengah Kejuruan yang terdiri dari 2 SMK Negeri dan 15 SMK Swasta. Jumlah SMK Swasta yang lebih banyak dari SMK Negeri dapat menjadi satu indikator ketertarikan masyarakat akan sekolah menengah kejuruan.

Dari hasil pengumpulan data dan informasi di lapangan, 17 SMK di Kota Cirebon berdasarkan akreditasi terbagi kedalam 4 kategori yang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1
Jumlah Sekolah Berdasarkan Akreditasi
Tahun Pelajaran 2004/2005

No	Kategori Akreditasi	Jumlah Sekolah
1.	A	4 Sekolah
2.	B	9 Sekolah
3.	C	1 Sekolah
4.	Belum diakreditasi	3 Sekolah
	Jumlah	17 Sekolah

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Cirebon (2005)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar SMK di Kota Cirebon berada dalam kategori akreditasi B yang dapat dikategorikan kedalam sekolah yang dinilai baik. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar SMK di Kota Cirebon memiliki mutu sekolah yang baik dalam hal komponen kurikulum dan proses pembelajaran, administrasi dan manajemen sekolah, organisasi dan kelembagaan sekolah, sarana dan prasarana, ketenagaan, pembiayaan, peserta didik, peran serta masyarakat serta lingkungan dan budaya sekolah.

Sementara itu berdasarkan tingkat kelulusan siswa diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 2
Tingkat Kelulusan SMK di kota Cirebon

No	Tahun Pelajaran	Prosentase
1.	2001/2002	99 %
2.	2002/2003	99,54 %
3.	2003/2004	92,75 %

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Cirebon (2005)

Data kelulusan tersebut menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan pada tahun pelajaran 2003/2004, namun secara keseluruhan jumlah lulusan ini

hampir mencapai 100 % setiap tahunnya. Ini mengindikasikan bahwa SMK di Cirebon setiap tahun pelajarannya berhasil meluluskan hampir seluruh siswanya. Kelulusan siswa ini tentunya berkaitan langsung dengan kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan.

Sebagaimana telah diuraikan, kegiatan belajar mengajar senantiasa harus didukung oleh ketersediaan dana dan pengelolaannya yang efektif dan efisien. Sumber dana pendidikan pada SMK di Kota Cirebon berasal dari beberapa sumber. Pada SMK swasta sumber biaya pendidikan lebih banyak berasal dari orangtua siswa, unit produksi dan sumber lain. Sedangkan khusus bagi SMK Negeri sumber biaya pendidikan terbesar didapat dari APBD dan orangtua siswa.

Biaya-biaya tersebut sangat diperlukan bagi sekolah untuk penyelenggaraan seluruh proses kegiatan belajar mengajar. Pengelolaan pembiayaan pendidikan dideskripsikan dalam upaya peningkatan mutu sekolah diprioritaskan pada program yang diarahkan untuk peningkatan kemampuan guru dan peningkatan fasilitas belajar yang mencakup pengadaan buku pelajaran dan perpustakaan sekolah, bengkel dan tempat praktek siswa, pengadaan alat peraga pendidikan.

Biaya pendidikan merupakan faktor yang turut menentukan mutu pendidikan dan mutu lulusan. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh R.L. Johns, E.L. Morphet, K. Alexander, yang dikutip oleh Nanang Fattah (2000:108) :

Biaya dan mutu pendidikan mempunyai keterkaitan secara langsung. Biaya pendidikan memberikan pengaruh yang positif melalui faktor kepemimpinan dan manajemen pendidikan, dan tenaga pendidik yang kompeten dalam meningkatkan pelayanan pendidikan melalui peningkatan mutu faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses belajar mengajar.



Berdasarkan Hasil penelitian pendahuluan subsidi pemerintah dalam keuangan pada Sekolah Menengah Kejuruan lebih kecil dari subsidi pemerintah terhadap Sekolah Menengah Atas. Padahal dana yang dibutuhkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan lebih besar karena dalam kegiatan proses belajar mengajar ada kegiatan praktek yang membutuhkan dana cukup besar bagi setiap siswa yang akhirnya dibebankan pada orang tua siswa . Padahal penghasilan orang tua siswa yang masuk ke Sekolah Menengah Kejuruan rata – rata penghasilannya kelas menengah kebawah. Berdasarkan hal - hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut tentang *Pengaruh Manajemen Pembiayaan Pendidikan terhadap Mutu Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Cirebon.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pencermatan yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah, dapat dikemukakan bahwa yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah "*Pengaruh Manajemen Pembiayaan Pendidikan terhadap Mutu Sekolah*", maka identifikasi masalah dalam penelitian ini sehubungan dengan rumusan permasalahan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan-kegiatan apakah yang dilakukan dalam perencanaan pembiayaan pendidikan di sekolah menengah kejuruan.
2. Kegiatan-kegiatan apakah yang dilakukan dalam implementasi pembiayaan pendidikan di sekolah menengah kejuruan.

3. Kegiatan-kegiatan apakah yang dilakukan dalam pengendalian pembiayaan pendidikan di sekolah menengah kejuruan.
4. Seberapa tinggi mutu sekolah menengah kejuruan .
5. Seberapa besar pengaruh manajemen pembiayaan pendidikan terhadap mutu sekolah menengah kejuruan.

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan informasi tentang pengaruh manajemen pembiayaan pendidikan terhadap mutu sekolah serta memberi informasi mengenai manajemen pembiayaan di sekolah.

Sedangkan Tujuan Khusus dari penelitian ini adalah :

1. Mengumpulkan informasi tentang kegiatan yang dilaksanakan dalam perencanaan pembiayaan pendidikan.
2. Mengumpulkan informasi kegiatan yang dilaksanakan dalam implementasi pembiayaan pendidikan
3. Mengumpulkan informasi kegiatan yang dilaksanakan dalam pengendalian pembiayaan pendidikan.
4. Mengumpulkan informasi tentang mutu sekolah.
5. Mengumpulkan informasi tentang pengaruh manajemen pembiayaan pendidikan terhadap mutu sekolah.



D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam dua aspek yaitu ;

1. Aspek keilmuan, yaitu bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang studi administrasi pendidikan tentang manajemen pembiayaan pendidikan dan bagi yang berminat untuk mendalami lebih jauh tentang ilmu pembiayaan pendidikan terutama dalam menunjang terlaksananya kegiatan belajar mengajar dalam upaya peningkatan mutu sekolah.
2. Aspek guna laksana, dimana hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk lebih mampu mendayagunakan manajemen pembiayaan pendidikan secara efektif dalam upaya meningkatkan mutu sekolah.

E. Kerangka Pemikiran

Biaya pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat memperlancar proses pendidikan dimana biaya dan mutu sekolah mempunyai keterkaitan secara langsung. Biaya pendidikan memberikan pengaruh yang positif melalui faktor kepemimpinan dan pengelolaan pendidikan dan tenaga pendidik yang kompeten dalam meningkatkan pelayanan pendidikan di sekolah melalui peningkatan mutu, faktor - faktor yang berpengaruh terhadap proses belajar mengajar.

Menurut Nanang Fattah (2000:108), mutu pendidikan di sekolah akan sangat ditentukan oleh faktor pembiayaan pendidikan, baik dalam besarnya, pengalokasian yang tepat, maupun pemanfaatan realisasi biaya yang mengarah

kepada kebutuhan proses belajar mengajar. Kemampuan pengelolaan mutu guru, mutu alat, mutu bahan dan mutu siswa akan berkaitan satu sama lain dalam proses belajar mengajar di sekolah. Ketersediaan komponen - komponen tersebut akan menciptakan kondisi yang baik untuk PBM dan pada gilirannya akan berpengaruh dan memberikan kontribusi dalam pencapaian prestasi belajar siswa.

Nanang Fattah (2000 : 130) lebih menekankan bahwa ada komponen-komponen biaya yang mempengaruhi upaya peningkatan mutu pendidikan sebagaimana diungkapkannya:

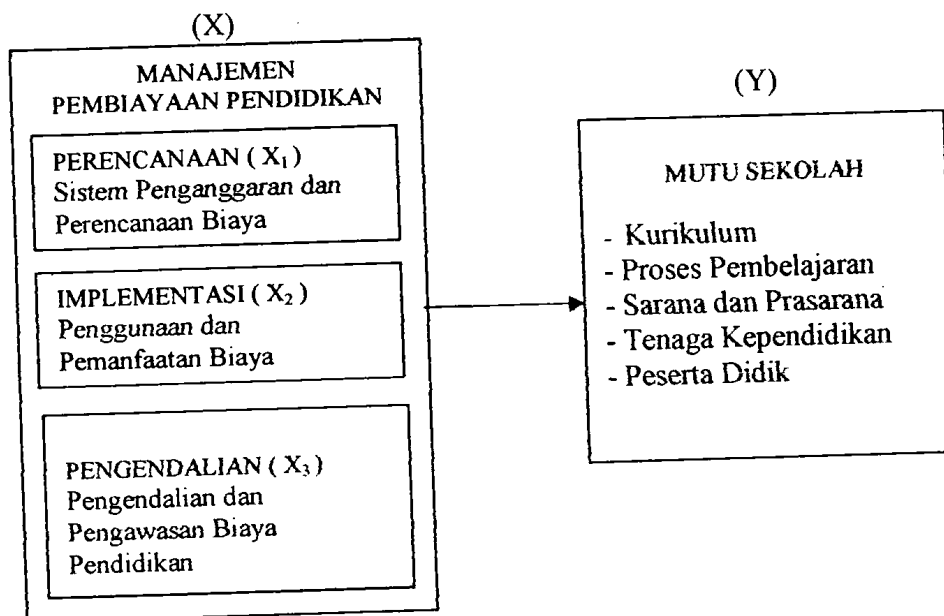
Komponen-komponen biaya pendidikan yang mempengaruhi upaya peningkatan mutu pendidikan yaitu ; gaji atau kesejahteraan guru, biaya pembinaan profesional guru, biaya pengadaan bahan pelajaran, biaya pembinaan siswa dan biaya pengelolaan sekolah.

Biaya pendidikan dimaksudkan sebagai jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang mencakup pembiayaan untuk keperluan akademik (PBM, media belajar, pengayaan belajar, kegiatan ekstrakurikuler, evaluasi belajar) dan keperluan non akademik (pengadaan sarana, gaji atau kesejahteraan, peningkatan profesional guru, rumah tangga sekolah). Kesemuanya itu ada dalam RAPBS selama satu tahun anggaran.

Pengelolaan keuangan yang efektif akan mendorong peningkatan mutu sekolah. Nanang Fattah (2000:110) menjelaskan bahwa untuk mengetahui tingkat efektivitas biaya atau analisis efektivitas biaya (*cost effectiveness analysis*) didasarkan atas hasil perhitungan besarnya kontribusi komponen - komponen biaya terhadap mutu proses belajar mengajar (PBM) dan hasil belajar siswa. Dimana mengukur mutu PBM menggunakan indikator - indikator 1) efisiensi

waktu, 2) optimalisasi sumber belajar, 3) pelaksanaan evaluasi dan 4) frekwensi bimbingan belajar. Sedangkan untuk mengukur mutu hasil belajar menggunakan indikator 1) UAN, 2) tingkat pengulangan, 3) tingkat putus sekolah.

Berdasarkan uraian tersebut maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1
Kerangka Pemikiran
Pengaruh Manajemen Pembiayaan Pendidikan terhadap Mutu Sekolah

F. Asumsi

Mutu sekolah yang baik dapat dilihat dari input dan proses pelaksanaan yang terencana dengan baik. Hal ini tercapai karena seluruh kegiatan sekolah dilaksanakan dengan baik, mulai dari proses kegiatan belajar mengajar, pengelolaan administrasi sekolah, guru yang profesional, sarana dan prasarana yang memadai serta peserta didik yang mempunyai prestasi di sekolah dan hasil kelulusan, siswa dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan atau langsung bekerja

sebagai tenaga siap pakai. Semua itu dapat terlaksana karena ditunjang oleh manajemen pembiayaan pendidikan yang baik atau memadai.

Berdasarkan uraian di atas, maka asumsi atau anggapan dasar penelitian ini dirumuskan sebagai berikut ini :

1. Bahwa setiap sekolah berupaya mempunyai mutu sekolah yang baik.
2. Bahwa mutu sekolah yang baik membutuhkan antara lain pembiayaan pendidikan yang memadai.
3. Bahwa untuk mencapai pembiayaan pendidikan yang baik diperlukan manajemen pembiayaan pendidikan yang baik.

G. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : " Terdapat Pengaruh yang Signifikan dari Manajemen Pembiayaan Pendidikan terhadap Mutu Sekolah "

